

PEMBAGIAN EPISTEMOLOGI HABERMAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL-BUDAYA

THE CLASSIFICATION OF HABERMAS EPISTEMOLOGY AND ITS IMPLICATION TOWARD SOCIAL-CULTURAL RESEARCH METHODOLOGY

Anas Saidi

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
anastopone@yahoo.com

Abstract

As a branch of philosophy which studies the nature of science, epistemology seems to be neglected in the research world. Some of young researchers assume that epistemology is only an abstract philosophical material unrelated with the methodology. As a consequence, research is often conducted based on the known methods rather than the nature of the reality. From the very beginning, therefore, the research has been biased in methodology. This paper discusses the classification of Habermas' epistemology. Habermas has classified the science paradigm into three categories, namely (1) Positivism (Technical knowledge interest or dominative knowledge), (2) Interpretative Paradigm (Humanistic or practical knowledge interest or descriptive science), and (3) Critical Paradigm (Emancipatory knowledge interest/ liberating knowledge). Understanding the strengths and weaknesses of each paradigm will encourage the researchers to determine the appropriate methodology based on the the nature of reality.

Keywords: *implication, epistemology, methodology, social-cultural, Jurgen Habermas*

Abstrak

Sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, epistemologi agaknya paling terabaikan dalam dunia penelitian. Sebagian peneliti muda umumnya beranggapan bahwa epistemologi hanyalah ulasan filsafat yang abstrak dan tidak ada kaitannya dengan metodologi. Implikasinya, setiap penelitian yang dilakukan tidak didasarkan pada sifat realitas yang akan diteliti, tetapi lebih pada pilihan metode yang dikuasai. Akibatnya, penelitian yang dilakukan telah mengalami bias metodologi sejak dari awalnya. Tulisan ini akan menguraikan pembagian epistemologi menurut Jurgen Habermas. Filsuf ini telah membagi paradigma Ilmu Pengetahuan menjadi tiga, yaitu (1) Paradigma positivisme atau juga disebut sebagai *technical knowledge interest/* ilmu pengetahuan dominatif, (2) Paradigma Interpretatif/ Humanistik atau juga disebut sebagai *practical knowledge interest/* ilmu pengetahuan deskriptif, dan (3) Paradigma Kritis atau yang disebut *emancipatory knowledge interest/* ilmu pengetahuan yang membebaskan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing paradigma tersebut, diharapkan peneliti dapat menyadari bahwa penetapan metodologi yang digunakan akan disesuaikan dengan sifat realitas yang diteliti.

Kata kunci: implikasi, epistemologi, metodologi, sosial-budaya, Jurgen Habermas

Pendahuluan

Epistemologi, barangkali, cabang filsafat yang bersentuhan dengan metodologi penelitian sosial, tetapi paling “terabaikan” diperkenalkan kepada para peneliti muda. Sejak mahasiswa umumnya mereka hanya diperkenalkan metode kuantitatif (survei) atau kualitatif (etnografi-hermeneutik), tanpa diperkenalkan landasan filosofis yang ada di belakangnya. Epistemologi seringkali hanya dianggap sebagai filsafat ilmu pengetahuan yang abstrak dan tidak ada kaitannya

dengan metodologi, apalagi metode penelitian yang dibutuhkan. Ketidaktahuan relasi antara epistemologi dengan metodologi memiliki implikasi serius bagi penelitian sosial-budaya yang dilakukan. Pilihan penetapan metodologi atau lebih tepatnya metode, yang tidak didasarkan pada pilihan epistemologi sebagai filter atas sifat realitas yang diteliti, mengundang bias awal yang akut. Sifat realitas yang beragam akhirnya sekadar dihampiri oleh pilihan metodologi yang semena-mena. Bagi mereka yang terbiasa menggunakan metode kuantitatif

(survei), apapun *subject matter* yang diteliti akan dikuantifikasi dengan uji statistik. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki kebiasaan melakukan penelitian kualitatif, apapun jenis datanya akan menggunakan etnografi, misalnya. Tulisan ini akan memperkenalkan epistemologi dan implikasinya terhadap metodologi penelitian sosial-budaya, dengan mengikuti pembagian filsuf kenamaan, Jurgen Habermas yang juga profesor pada Universitas Frankfurt, Jerman.

Jurgen Habermas adalah filsuf generasi kedua dari mazhab Frankfurt yang lahir di Dusseldorf, Jerman, tahun 1929. Seperti umumnya keluarga Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an, keluarga Habermas juga pro-Nazi. Habermas sendiri, menjelang akhir perang dunia kedua, juga bergabung dengan Pemuda Hitler. Namun, akhirnya ia menyadari kebrutalan Nazisme. Pengalaman itu rupanya yang membuat Habermas menghabiskan seluruh minatnya untuk mempelajari dan mempromosikan demokrasi sepanjang karyanya. Habermas belajar filsafat dan memperoleh doktor yang pertama pada tahun 1954 di bawah bimbingan Theodoro Adorno dan Max Horkheimer. Di sinilah Habermas memulai dialog panjang dengan Kant, Hegel, Marx, dan Weber.

Pengetahuannya yang sangat luas dan sulit dipahami itu antara lain meliputi masalah: sosiologi, linguistik, sejarah, hukum dan demokrasi, epistemologi dan moralitas. Meskipun tema utamanya yang paling kuat adalah mempromosikan demokrasi radikal -- proses demokrasi yang inklusif, partisipatif, informatif, dan deliberalif (partisipasi yang membebaskan). Kuatnya semangat bahwa perlunya apa yang ia sebut "*emancipatory knowledge*" (pengetahuan yang membebaskan), membuat Habermas digolongkan ke dalam paradigma teori Kritis. Beberapa bukunya yang utama antara lain: *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989), *Knowledge and Human Interest* (1971), *Legitimation Crisis* (1975), *The Theory of Communication Action* (1984) dan *Between Fact and Norm* (1986).

Tulisan ini hanya akan mengulas pandangan epistemologinya, khususnya atas pembagian yang dilakukan dan implikasinya terhadap metodologi ilmu sosial-budaya. Untuk membawa pada pengertian yang lebih rinci kaitan antara epistemologi dengan metodologi,

ada baiknya dibahas secara sekilas apa sebenarnya yang menjadi konsentrasi dalam epistemologi; khususnya hubungannya dengan ontologi.

Secara definitif, ontologi sering didefinisikan sebagai *being of reality* atau "*From a philosophical point of view, ontology is the science or study of being*". ...*Ontological assumptions are concerned with what we believe constitutes social reality* (Blaikie, 2000: 8). ... Sementara itu, *epistemology is the science of knowing, methodology (a subfield of epistemology) might be called "the science of finding out"* (Babbie, 1992: 7).

Kaitan antara ontologi, epistemologi dan metodologi inilah sering kali disebut paradigma. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn (1970) dalam bukunya yang terkenal *The Structure of Scientific Revolutions*. Secara sederhana paradigma dapat diartikan sebagai serangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan (Guba, 1990: 17). Paradigma berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar. Paradigma adalah konstruksi manusia. Paradigma menentukan pandangan dunia. Ada tiga elemen yang ada dalam paradigma, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi berbicara tentang hakikat realitas, epistemologi berbicara tentang hakikat ilmu pengetahuan, dan metodologi berbicara cara memperoleh pengetahuan.

Dalam dunia ilmu pengetahuan sosial terdapat sejumlah kategori paradigma yang dilakukan para ahli. Egon G. Guba (1990) telah membagi menjadi empat paradigma; (1) paradigma positivisme; (2) paradigma post-positivisme; (3) konstruktivisme; (4) teori kritis. Poloma (1987) membagi menjadi tiga paradigma, yaitu Paradigma Fakta Sosial (Durheimian), Paradigma Definisi Sosial (Weberian), dan Paradigma Behaviorisme (Skinnerian). Sementara Habermas (1968) membagi menjadi tiga paradigma, yaitu (1) Positivisme, (2) Interpretatif/ Humanistik, dan (3) Kritis. Dalam perspektif sosiologi klasik, paradigma Posivistik seringkali dikaitkan dengan Emile Durkheim, Paradigma Interpretatif dengan Max Weber, dan Paradigma Kritis dengan Karl Marx.

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan yang mendasar atas pembagian paradigma tersebut, terutama jika dilihat dari sumber ontologi dan epistemologi yang dianut. Epistemologi Posivistik berangkat dari asumsi

filosof Windeband tentang *nomotetis* yang diteruskan oleh Comte, Durkhiem, dan terutama sekali dipopulerkan oleh Karl Popper. Paradigma interpretatif didasarkan pada epistemologi filsuf Dilthey tentang *ideografis*, ditemukan fakta sosiologisnya pada Max Weber, Husserl, Albert Schutz, Gadamer, Ricoeur, Geertz, dan Peter Berger. Adapun paradigma Kritis didasarkan pada pemikiran Karl Marx, yang dipopulerkan oleh kelompok Frankfurt, seperti: Adorno, Herbert Marcuse, dan termasuk Jürgen Habermas.

Ontologi: Ada dan Menjadi

Dalam dunia filsafat, perdebatan tentang hakikat realitas (*being of reality*) itu sudah dimulai oleh Parmenides (540-515 SM) filsuf Yunani Kuno pertama yang memikirkan dasar segala sesuatu secara ontologis. Menurut Parmenides segala yang ada dalam “Ada” (*all what is*) dengan ungkapan yang terkenal “yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada”. Parmenides meyakini ketetapan nalar dalam menyerap dan memeluk kebenaran mutlak, yakni “Ada”. Sebaliknya menurut Herakleitos (540-475 SM), yang ada itu *menjadi* (*becoming*). Dengan kata lain, Parmenides menekankan tentang “Ada” dan Herakleitos menekankan yang “menjadi” (Adian, 2010:1).

Perdebatan itu dilanjutkan Plato dan Aristoteles yang mempersoalkan substansi realitas. Plato yang terkenal dengan gagasannya tentang ide, menyebutkan bahwa sumber pengetahuan itu terletak pada “gagasan” (idealisme) yang bersumber pada pikiran. Sebaliknya Aristoteles menganggap sumber pengetahuan adalah (realisme) yang bertumpu pada empirisme. Perdebatan ini ditengahi oleh Immanuel Kant dengan kata-katanya yang terkenal bahwa “pikiran tidak bisa melihat, pancaindra tidak bisa berfikir”. Intinya sumber pengetahuan bermuara dari keduanya.

Dengan demikian kita tidak dapat membicarakan masalah epistemologi, sebelum mendiskusikan masalah ontologi. Sebab, ontologi merupakan asumsi dasar tentang hakikat realitas yang harus dipahami sebelum membicarakan asumsi tentang hakikat ilmu pengetahuan. Demikian juga kita tidak dapat membahas masalah metodologi tanpa membahas lebih dulu masalah epistemologi.

Sementara itu, ada sejumlah masalah yang biasanya dipersoalkan dalam epistemologi.

Pertama, apakah realitas sosial itu objektif yang berpusat pada *pengalaman* (indra) atau subjektif yang bertumpu pada *makna*. *Kedua*, apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai (*free value*) atau terikat nilai. *Ketiga*, apakah realitas sosial itu bersifat deterministik, bersifat kausalitas, dan linier atau sebaliknya bersifat cair dan siklus. *Keempat*, apakah asumsi kebenaran itu harus dibuktikan melalui verifikasi pengalaman indrawi atau melalui pemahaman (tafsir).

Perdebatan itu ternyata memiliki implikasi luas. *Pertama*, bagi kaum positivis pewaris tradisi Aristotelian realitas itu bersifat objektif dan hanya dapat diketahui melalui pengalaman indrawi. Bagi realisme “dunia yang kita ketahui berada terlepas dari pengetahuan kita terhadapnya”. Sebaliknya, bagi kaum ideografis (subjektivis) realitas merupakan hasil konstruksi berbagai kepentingan yang bersifat subjektif.

Kedua, bagi kaum positivis ilmu adalah bebas nilai. Tidak ada pertanyaan moral yang dapat disertakan dalam kebenaran ilmu. Tugas ilmuwan hanyalah memotret realitas itu apa adanya (*how to know*) dan tidak ada kewajiban untuk mengubahnya (*how to change*). Sebaliknya bagi kaum subjektivis (kelompok kritis), ilmu tidak netral. Tugas ilmuwan bukan sekadar mengetahui realitas (*how to know*) secara apa adanya, tetapi juga berkewajiban untuk mengubahnya (*how to change*).

Ketiga, pada hakikatnya dalam ilmu pengetahuan (sosial) ada keteraturan (*pattern*) yang dapat dilacak sebab-akibatnya dan jalannya perubahan bersifat linier. Karenanya dapat diramalkan. Sebaliknya bagi kaum subjektivis, tidak ada keteraturan yang dibakukan dalam sebab-akibat yang deterministik. Terlalu banyak *keunikan* yang tidak bisa diseragamkan dan diprediksi secara matematis, karena jalannya realitas cenderung mengulang (siklus).

Keempat, kebenaran realitas sosial hanya bisa disebut objektif, jika dapat dibuktikan (*verified*) melalui verifikasi empiris yang dapat ditempuh melalui uji-statistik. Bagi kaum subjektivis kebenaran bukan sekadar fakta, melainkan lebih berkaitan dengan nilai (makna) dan makna tidak dapat direduksi melalui verifikasi atau falsifikasi, melainkan oleh pemahaman (tafsir).

Perdebatan apakah ilmu itu “bebas nilai” dan netral atau sebaliknya terikat nilai dan tidak

netral telah memiliki implikasi terhadap peran ilmuwan. Apakah peneliti dan objek yang diteliti harus dianggap terpisah atau keduanya harus dilibatkan sebagai instrumen perubahan sosial. Implikasinya apakah seorang ilmuwan hanya bertugas untuk memotret realitas sosial itu secara apa adanya, berjarak, dan tidak bertanggungjawab atas realitas itu ataukah mereka bertanggungjawab atas perubahan sosial seperti yang dikehendaki.

Sementara itu, Habermas membagi paradigma ilmu pengetahuan menjadi tiga. *Pertama*, paradigma *instrumental knowledge*. Dalam paradigma ini pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang digolongkan dalam paradigma ini adalah Positivisme. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara tradisi ilmu pengetahuan ilmu alam, dengan kepercayaan adanya generalisasi dan universalisme. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menemukan hukum-hukum dalam fenomena alam dan fenomena sosial (Habermas, 1968, Akhyar, 2011). Prinsip-prinsip epistemologi inilah yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif.

Habermas mengelompokkan sebagai ilmu empiris-analitis, yang perlakuannya seperti ilmu alam. Tugasnya mencari hukum-hukum kausalitas yang bersifat nomotetis. Tujuan ilmu ini pada dasarnya untuk penguasaan alam. Habermas menunjuk bahwa apa yang biasanya dianggap sebagai pengamatan-pengamatan indrawi bukanlah sebuah pengamatan, melainkan pengorganisasian kesan-kesan indrawi di bawah kepentingan penggunaan teknis proses-proses yang diobjektifkan (Habermas, 1968; Magnis, 1990; Akhyar, 2011).

Di dalam ilmu-ilmu empiris-analitis, sistem referensi yang sudah mengambil sikap lebih dulu terhadap makna dari pernyataan-pernyataan yang mungkin dihasilkan oleh ilmu-ilmu empiris menetapkan aturan-aturan, baik untuk membangun teori-teori maupun untuk pengujiannya secara kritis (Habermas, 1968: 165).

Kedua, paradigma ilmu-ilmu historis hermeneutik (*hermeneutic knowledge, interpretative knowledge*). Dasar filsafat aliran ini adalah *phenomenology* dan *hermeneutics*, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami (*verstehen, understand*).

Epistemologi inilah yang menjadi dasar metodologi penelitian kualitatif. Bidang yang biasanya dikategorikan dalam ilmu-ilmu historis-hermeneutik antara lain sejarah, ilmu pengetahuan budaya, dan ilmu kemanusiaan lainnya. Tujuannya untuk mengungkapkan makna, sedangkan yang diusahakan adalah peningkatan saling pengertian dengan tujuan tindakan bersama.

Ketiga, paradigma kritis atau *critical/ emancipatory knowledge*. Bagi paradigma ini, ilmu sosial lebih dipahami sebagai proses katalisasi untuk membebaskan (*emancipatory*) manusia dari segenap ketidakadilan. Paradigma ini memperjuangkan pendekatan yang bersifat holistik serta menghindari cara berfikir deterministik dan reduksionistik. Paradigma inilah yang menjadi penyumbang utama *Action Research* atau yang juga terkenal dengan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Community Base Research* (CBR) itu. Kelompok ini oleh Habermas dikategorikan sebagai ilmu tindakan. Bidang yang termasuk dalam kategori ini antara lain ilmu ekonomi, sosiologi, atau ilmu-ilmu reflektif, seperti kritik ideologi atau filsafat. Kepentingan internal kategori ilmu ini adalah pembebasan. Metode dasar ilmu-ilmu ini adalah refleksi kritis atas sejarah subjek manusiawi (Habermas, 1968; Magnis, 1990).

Jika dalam paradigma Positivis tugas ilmu adalah untuk meramalkan, mencari penjelasan sebab-musabab, dalam paradigma Interpretatif tugas ilmu adalah untuk memahami realitas, mencari makna. Sementara dalam paradigma kritis tugas ilmu bukan hanya untuk memotret realitas, tetapi juga mengubahnya (membebaskan). Dalam ilmu-ilmu humaniora (*Geisteswissenschaften*) fakta-faktanya hanya bisa ditangkap dengan *Verstehen* (pemahaman), yang di dalamnya tidak begitu penting untuk hukum-hukum umum (generalisasi). Fenomenologi menyingkapkan kemampuan-kemampuan suatu subjektivitas yang memberi makna. Dalam pandangan Husserl, subjektivitas yang aktif ini menghilang di bawah selimut pemahaman diri yang objektif.

Ilmu-ilmu historis-hermeneutis memperoleh pengetahuannya dalam kerangka metodologis yang lain. Di sini makna validitas pernyataan-pernyataan tidak mengkonstitusikan diri di dalam sistem referensi penguasaan teknis. Pemahaman makna (*sinnverstehen*), dan bukan

pengamatan, yang merintis jalan menuju fakta-fakta. Pengujian hipotesis-hipotesis yang sistematis digantikan oleh penafsiran teks (Habermas, 1968).

Di dalam dunia filsafat, perdebatan antara epistemologi Positivistik dengan epistemologi interpretatif (hermeneutik) sebenarnya sudah lama terjadi. Jauh sebelum Habermas (1968) membagi tipe ilmu pengetahuan sosial itu. Filsuf Jerman Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Windeband telah memperlmasalah apa yang mereka namakan ilmu *ideografis* dan ilmu *nomotetis*. Ilmu *nomotetis* (beta) berkaitan dengan pengkajian ilmu alam (*natural science*) dengan gejalanya yang berulang-ulang, memungkinkan terciptanya sebuah hukum. Sebaliknya ilmu *ideografis* (alfa) berhubungan dengan gejala yang unik dan tak berulang sehingga dibutuhkan metode yang berbeda dari metode ilmu alam.

Sementara itu, di dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, biasanya yang disebut-sebut sebagai pelopor epistemologi Positivistik adalah Auguste Comte (1798-1875). Dia pulalah yang menamakan sosiologi sebagai fisika sosial. Namun, sebenarnya yang paling berjasa dalam penggunaan metode itu adalah Emile Durkheim (1858-1917). Kendati Karl Popper (1906-1994) yang sebenarnya paling berjasa mempromosikan logika Positivistik dalam beberapa bukunya, antara lain *The Logic of Scientific Discovery* (1959) dan *Objective Knowledge* (1973).

Paradigma Positivistik ini pada dasarnya terikat pada ide yang memandang sosiologi sebagai ilmu yang memiliki kesamaan dengan posisi ilmu alam sebagai ilmu. Salah satu hal yang paling penting dari pandangan ini adalah adanya keyakinan bahwa fenomena sosial pada dasarnya memiliki pola serta tunduk pada hukum-hukum yang deterministik, sebagaimana hukum-hukum yang mengatur hukum ilmu alam (Poloma, 1984: 5; Tashakkori & Teddlie (Eds.), 2003).

Emile Durkheim adalah salah satu tokoh yang menghasilkan karya klasik yang menjadi tumpuan teori Positivistik. Ia menyebut sosiologi sebagai “fakta sosial” dan fakta sosial itu adalah suatu konsep yang memiliki realitas empiris di dalam imajinasi individu. Fakta sosial antara lain meliputi status perkawinan, usia, agama, kondisi ekonomi, tingkat bunuh diri dan kejahatan. Fakta sosial atau variabel itu konkret, dapat diamati, dan dapat diukur.

Dalam penelitiannya tentang bunuh diri, melalui data statistik, Durkheim melihat keajegan yang mencolok dalam data yang ditemui dan ternyata gejala itu tidak dapat dijelaskan melalui faktor-faktor iklim, keturunan, penyakit jiwa, dan sebagainya. Keajegan itu harus dijelaskan secara sosial. Data juga menunjukkan bahwa orang-orang yang sendirian ternyata lebih banyak yang bunuh diri daripada orang yang sudah menikah. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepaduan kelompok (kohesi sosial). Oleh karena itu, fenomena yang menunjukkan lebih banyak orang Protestan yang bunuh diri daripada orang Katolik dapat dijelaskan, yaitu karena orang Katolik lebih terikat pada komunitas-komunitas keagamaan, sedangkan dalam Protestanisme terdapat anjuran yang kuat untuk bertanggungjawab secara individual (Denzin & Lincoln, 1997; Laeyendecker, 1983; Johnson, 1981). Temuan-temuan inilah yang di kemudian hari melahirkan sebuah teori yang terkenal, yang menyatakan ada korelasi positif antara lemah dan kuatnya kohesi sosial dengan gejala bunuh diri.

Dari uraian singkat atas pengertian fakta sosial Durkheim di atas, sangatlah jelas apa yang sebenarnya menjadi dasar epistemologi Durkheim yang membawa pada kesimpulan atas kebutuhan-kebutuhan pengutamaan faktor eksternal, keajegan hukum sosial, hukum kausalitas, tuntutan objektivitas, dan sifat empiris dalam ilmu sosial yang kemudian menjadi dasar epistemologi Positivistik.

Semua hal itu menampilkan ciri-ciri paham Positivistik sebagai paham yang memiliki kecermatan dalam mengkonstruksikan teori, khususnya dalam penyusunan proposisi yang berkaitan dengan sifat teori sebagai “*set of interconnected propositions*” di samping sebagai “*unified theory of society*”. Oleh karena itu, konseptualisasi seharusnya mampu melakukan prediksi setelah mengalami verifikasi dan falsifikasi.

Mengenai masalah falsifikasi, Popperlah yang memperkenalkannya sebagai pelengkap epistemologi Positivistik. Dengan batasan yang sangat ketat antara pengetahuan ilmiah dan bukan ilmiah, yaitu testabilitas, refutabilitas, verifikasi dan falsifikasi, maka epistemologi Positivistik menjadi kokoh. Popper tidak puas atas tuntutan empiris yang hanya melalui verifikasi tanpa falsifikasi. Sebab, hukum ilmiah pada dasarnya merupakan hipotesis atau

merupakan dugaan belaka, yang perlu pengujian dengan metode “*trial and error*”. Semakin sering dan semakin berhasil suatu hipotesis itu diuji serta mendapatkan konfirmasi, maka semakin besar kebenarannya (Kleden, 1983).

Hal itulah yang sering dianggap sebagai pemecah kemacetan pendekatan induksi yang menjadi dasar metode kualitatif. Induksi yang selalu terbatas pada sejumlah hal yang terhingga tidak mungkin dijabarkan dalam pernyataan umum. Sebaliknya, pernyataan umum tidak dapat diverifikasikan oleh suatu proses verifikasi yang terhingga. Dengan demikian cara induksi dianggap tidak berperan dalam epistemologi atau metode ilmiah.

Dengan falsifikasi, seseorang teorisi selalu akan memilih teori yang akan ditolak, dengan pengertian bahwa ia akan menerima unsur-unsur teori lama itu yang ternyata dapat bertahan melalui pengujian dan sekaligus menjelaskan di mana teori lama itu gagal dan sekaligus di mana teori itu berhasil. Teori baru itu akan tetap dipegang selama ternyata dapat bertahan terhadap pengujian dan akan digugurkan apabila ternyata tidak cocok (Kleden, 1983).

Pemikiran Popper tersebut memiliki tiga unsur. Pertama, sebagai metode untuk *testing* hanya bisa digunakan metode deduksi. Kedua, kekuatan teori tidak dapat diukur berdasarkan verifikasi, melainkan hanya mungkin berdasarkan falsifikasi. Ketiga, pengetahuan tidak dapat dicari dasarnya pada observasi, melainkan hanya mungkin pada teori yang diajukan sebagai ikhtisar pemecahan masalah (Kleden, 1983).

Singkatnya epistemologi Positivistik atau juga disebut sebagai pendekatan Objektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- (1) Cenderung menganggap manusia bersifat pasif dan perubahan banyak ditentukan oleh faktor dari luar.
- (2) Kebenaran hanya dapat ditemukan jika peneliti mengambil jarak dari objeknya.
- (3) Perilaku manusia adalah nyata, dapat diamati, diukur melalui variabel, indikator yang ditentukan dan sebagainya serta dapat diramalkan.
- (4) Memandang ada keteraturan dalam realitas sosial dan dalam perilaku manusia, meskipun keteraturan itu bersifat probabilistik.
- (5) Peneliti memulai dengan suatu kerangka teoritis, merumuskan hipotesis, dan secara

logis mereduksi apa atau bagaimana seharusnya hasil penelitian jika hipotesis itu benar.

- (6) Untuk menguji hipotesis, peneliti harus mengoperasionalkan variabel yang terkandung dalam hipotesis dan mengujinya secara logis dan empiris.
- (7) Dalam derajat tertentu perilaku manusia dapat diramalkan, meskipun ramalan tersebut tidak setepat perilaku alam.
- (8) Pengetahuan dapat disebut jika penjelasannya dapat diamati oleh setiap orang melalui pancaindra.
- (9) Perilaku manusia banyak ditentukan oleh struktur sosial yang bersifat eksternal, umum, dan memaksa.
- (10) Unsur terpenting dalam pendekatan positivistik (objektif) adalah eksplanasi atau penjelasan (Denzin & Lincoln, 1997).

Evaluasi terhadap Epistemologi Positivistik

Kritik yang paling tajam atas paradigma Positivistik ini dilancarkan oleh historisme. Menurut aliran ini, metode generalisasi yang diambil alih oleh ilmu fisika, sangat menyesatkan. Sebab, metode eksperimen dalam ilmu-ilmu sosial tidak mempunyai arti yang sama dengan eksperimen dalam bidang fisika. Kejadian dalam ilmu sosial lebih bersifat semu, dalam arti tidak akan diulang seperti dalam ilmu alam, karena masyarakat memang selalu berubah. Ini berarti bahwa setiap saat kita harus siap menghadapi kejadian yang pada hakikatnya merupakan kejadian baru. Dan ini juga tidak terjadi dalam bidang fisika. Kalaupun metode yang digunakan dalam bidang fisika bisa diterapkan dalam bidang masyarakat, metode itu tidak dapat diterapkan pada sifat yang terpenting. Dengan kata lain, cara fisika tidak akan menyumbangkan banyak kepada pengertian kita tentang perkembangan sosial.

Lebih dari itu, dalam ilmu sosial tidak dikenal suatu hal yang dapat dibandingkan dengan hukum kausal yang dirumuskan secara matematis seperti dalam bidang fisika. Kendatipun begitu, menurut Historisme, ilmu sosial harus mencari penjelasan-penjelasan yang bersifat kausal, misalnya, dapat menerangkan bahwa imperialisme disebabkan oleh ekspansi industri. Akan tetapi apabila usaha itu dilakukan untuk menerjemahkan hukum sosiologi ke dalam bentuk kuantitatif, maka usaha itu merupakan hal yang sia-sia. Dengan kata lain, hukum sosial tidak dapat dirumuskan secara matematis.

Terlalu banyak “keunikan” yang terjadi dalam tingkah laku manusia. Malahan, secara konseptual, ilmu sosial tertentu lebih mengandung teka-teki dibandingkan ilmu alam (Ryan, 1969: 24).

Kekurangnisan ilmu-ilmu sosial menyebabkan tingkat keberhasilan dalam memprediksi fenomena sosial sangat rendah, jika dibandingkan dalam ilmu-ilmu alam seperti astronomi. Hal itu disebabkan oleh fenomena sosial jarang yang muncul secara berulang-ulang dan pasti dalam bentuk yang sama. Itulah sebabnya memprediksi gerhana matahari akan sangat berbeda kejituan dibandingkan meramalkan sebuah revolusi.

Dalam hal ini, Mc. Iver memberikan ilustrasi yang menarik, yaitu ada distingsi antara tipe kausalitas yang menyangkut sehelai kertas yang diterbangkan angin dengan tipe kausalitas yang menyangkut orang yang melarikan diri dari masyarakat yang mengejanya. Kertas tidak takut dan angin tidak membenci. Namun, orang-orang lari itu ada perasaan ketakutan. Demikian juga apa sebabnya pemerintahan jatuh, akan berbeda dengan apa sebabnya sebuah meteor jatuh ke bumi. Oleh karena itu, dalam metode penelitian sosial, “*verstehen*” (*understanding*) merupakan masalah kunci. Makin rumit persoalan dalam penelitian sosial, “pemahaman” semakin diperlukan. Ilmu pada dasarnya tidak hanya menerangkan (kausalitas), melainkan juga berusaha memahami (*verstehen*).

Bagaimanapun setiap masyarakat menuntut analisis yang khas. Tidak mungkin menerangkan perilaku manusia dengan hanya memeriksa keteraturan statistik dalam bahasa fisika. Berbeda dengan hukum alam, orang dapat menyimpang dari kaidah untuk menaati atau tidak. Tanpa melihat keyakinan ini, dunia sosial tidak akan pernah dianalisis (Peursen, 1985: 57). Memahami bukan sebagai usaha batiniah yang subjektif, melainkan sebagai keharusan melihat kerangka yang lebih luas.

Singkatnya, perilaku manusia tidak “teratur” dan tidak “berulang” (*uniform*), baik dilihat dari sudut individu maupun antarmasyarakat. Oleh karena itu, perilaku manusia tidak dapat diukur dan tidak dapat diramalkan secara pasti. Menurut Weber, ilmu tentang manusia mempunyai orisinalitas atau kekhasan yang disebabkan oleh kenyataan bahwa kelakuan manusia: (a) Dapat dipahami dari dalam, (b) Bersifat historis, dan (c) Selalu

mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Variabel seperti umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan sebagainya, seperti diungkapkan Durkheim, tidak memainkan peran yang sama sebagaimana suhu tekanan dalam benda.

Dengan *verstehen*, Weber mengkritik secara tajam logika Positivistik yang tidak mengindahkan peran aktor dalam realitas sosial. Weber tidak menganut “*hemean*” tentang kausalitas tapi lebih menjelaskan aksi-aksi itu secara subjektif (Turner, 1984:10). Kecenderungan Positivistik yang berpegang pada keterangan sebab akibat, memiliki keterbatasan. Baginya, ada keterbatasan berlakunya mata rantai sebab akibat (A muncul karena B, B muncul karena C, dan seterusnya).

Sementara itu, kritik terhadap epistemologi Popper adalah bahwa verifikasi maupun falsifikasi ternyata mengandung masalah yang tidak hanya bersifat empiris. Pertama, penerapan benar (verifikasi) dan tidak benar (falsifikasi) merupakan kasus batas yang dalam bentuk mutlak jarang terjadi. Tuntutan falsifikasi sebagai tuntutan penolakan terlalu logis dan terlalu jauh dari praktik kegiatan ilmu. Kedua, pada kegiatan ilmiah sering terjadi bahwa sesuatu teori dipertahankan, walaupun ada bagian yang jelas dapat dibantah (ada imunisasi dalam teori). Ketiga, dapat dikatakan bahwa suatu teori menghantar seluruh sistem ilmu. Suatu teori tidak memberikan pendeskripsian fakta, yang bisa “benar” dan “tidak benar”, melainkan ketentuan apa yang harus dilaksanakan untuk mengemukakan ilmu lebih lanjut; dan hal itu dapat “tepat” atau “tidak tepat” (Peursen, 1985: 49).

Sebenarnya kritik yang paling tajam untuk Popper ini dilancarkan Thomas Kuhn (1922-1996) dalam bukunya yang terkenal “*The Structure of Scientific Revolutions*” (1969). Menurut Kuhn, Karl Popper sangat dipengaruhi oleh “*idea of progress*”, yaitu keyakinan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan akan berjalan secara linear dan setiap pergantian paradigma lama oleh paradigma baru selalu diartikan sebagai kemajuan. Hal ini menurut Kuhn dianggap suatu model yang “ahistoris” yang tidak terbukti dalam sejarah ilmu pengetahuan (Kleden, 1983: 19).

Ditunjukkan bahwa apabila suatu eksperimen tidak berhasil membuktikan *prognosis*, maka yang pertama-tama harus dipermasalahkan bukanlah teori yang mendasarinya, melainkan

ilmuwan yang merencanakan prosedur eksperimen. Menghadapi sebuah masalah tak banyak bedanya dengan menghadapi teka-teki. Seorang peneliti yang buru-buru menyalahkan teorinya seperti seorang tukang kayu yang menyalahkan pemukul dan gergaji kalau kursi yang dibuatnya ternyata tidak sesuai dengan model yang dipesan. Di samping menurut Kuhn, eksperimen crusi, yaitu eksperimen yang sungguh-sungguh menjatuhkan teori lama, merupakan peristiwa yang terjadi sekali saja dalam sejarah ilmu pengetahuan. Seharusnya menurut Kuhn, apabila suatu hipotesis tidak terbukti dalam suatu tes empiris, hipotesis itu tidak langsung difalsifikasi, melainkan dimasukkan dalam kelompok anomali; dan apabila anomali itu mulai bertambah banyak dan kian menumpuk, barulah kemudian timbul krisis (Kleden, 1983: 20).

Kritik lain yang sangat tajam terhadap Popper, dilancarkan oleh P. Wic (1926-1988) dalam bukunya "*the idea of social science and its relation to philosophy*" (gagasan tentang ilmu pengetahuan sosial dan hubungannya dengan filsafat) 1988. Menurut Winch, antara ilmu sosial dan ilmu alam terdapat perbedaan yang mendasar. Tingkah laku manusia tidak terlepas dari pemberian makna dan interpretasi oleh manusia itu sendiri dan sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional untuk mencapai sasaran tertentu. Itulah sebabnya dalam menggambarkan dan menjelaskan perilaku manusia harus memperhitungkan ciri-ciri spesifik dari kenyataan sosial yang ada. Tugas ilmu sosial adalah memberi interpretasi dengan menerangkan "pengertian" (*meaning*) konsep yang berkaitan dengan perilaku aktor, dengan metode *verstehen* (Wuisman, 1996: 29).

Asumsi Dasar Epistemologi Interpretatif

Dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, pada dasarnya ada tiga isu pokok yang mendasari paradigma Interpretatif ini. Pertama, paradigma ini menerima "*common sense*" tentang sifat manusia. Kedua, paradigma ini yakin bahwa pandangan "*common sense*" dapat dan harus diberlakukan sebagai premis, tempat perumusan sosiologi ini berasal. Ketiga, paradigma ini lebih mengetengahkan masalah kemanusiaan daripada usaha untuk menggunakan preskripsi metodologi yang bersumber pada ilmu-ilmu alam. Dengan kata lain, ilmu sosial berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, penggunaan metode fisika (matematik) untuk

memperoleh watak ilmiah dianggap terlalu menyimpang dari masalah kemanusiaan.

Sebenarnya yang menjadi peletak dasar dari paradigma ini adalah W. Dilthey, yang kemudian diteruskan oleh Gadamer (1900), Paul Ricoeur (1913), O. Apel (1922). Secara umum, yang menjadi ciri utama hermeneutika yang mengandalkan *verstehen* ini antara lain; pertama, metode ilmu sosial yang dianggap paling cocok untuk menghasilkan pengetahuan interpretatif adalah yang berdasarkan pada *verstehen*, yang merupakan cara pengembangan pengetahuan yang memanfaatkan kemampuan manusia menempatkan diri dalam situasi dan kondisi orang lain; dengan tujuan memahami pikiran, perasaan, cita-cita, dorongan, dan kemauannya. Kedua, kalau ilmu alam dikatakan bersifat "nomologis", yakni bertujuan menghasilkan sejenis "penjelasan" (*explanation*) yang mengungkapkan hukum alam (*natural laws*) yang umum atau universal, yang memungkinkan penurunan metode matematis, ilmu sosial seharusnya bersifat "*hermeneutic*", yaitu memberikan "pemahaman" (*understanding*) yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*) dan mendalam (*in depth*) tentang gejala yang menjadi objek studinya (Wuisman, 1996: 50).

Jika Emile Durkheim yang dianggap paling berjasa mengembangkan epistemologi Positivistik, dalam epistemologi Humanistik ini tokoh yang dianggap berjasa adalah Max Weber. Sebagaimana diuraikan di depan, Weber menolak kecenderungan epistemologi Positivistik yang berpegang pada keterangan sebab akibat, terutama adanya keterbatasan berlakunya mata rantai sebab akibat itu. Oleh karena itu, ia berpijak dari metodologinya yang sering disebut sebagai "*verstehen*" atau substansi yang dihadapi, yakni suatu pendekatan yang berusaha mengerti makna yang mendasari peristiwa sosial dan historis. Pendekatan ini berpijak dari ide bahwa setiap situasi sosial didukung oleh jaringan makna yang dibuat oleh sang aktor yang terlibat di dalamnya. Dari jaringan makna yang diberikan aktor terjadi sebuah dialog yang terus menerus. Tugas seorang sosiolog atau peneliti adalah berusaha "mengerti" maksud itu, sebagaimana diartikan oleh aktor dalam peristiwa sosial. Dengan demikian "pengertian" dari usaha merangkul fenomena secara keseluruhan dan utuh, dengan harapan seseorang akan dapat menangkap struktur internal dari sebuah tindakan. Setidaknya, pendekatan secara *verstehen* adalah sebuah upaya menjaring sesuatu yang ada di belakang tindakan yang

eksplisit yang dapat dilihat (Abdullah, 1979: 14-16; Turner, 1984).

Ringkasnya, Weber mengembangkan analisis metode sosiologis yang bersentral dalam arti subjektif; aksi dilihat dari pandangan si pelaku sosial dan bukan perilaku itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Weber, peristiwa fisik yang sama dapat menumbuhkan berbagai makna yang berbeda. Dalam hal ini, tugas seorang sosiolog adalah memahami aksi-aksi yang ada melalui definisi subjektif sang aktor atas keadaan yang bersangkutan. Metode Weber ini berbeda dengan pendekatan intuitif yang mengharap penghayatan sosiolog atas peran aktor sosial (Turner, 1984: 71).

Teori Weber ini sekaligus mengatasi kesulitan yang biasanya terdapat dalam aliran intuitif bahwa aliran fenomenologis yang sering mengalami jalan buntu dalam menerka motivasi sang aktor. Metode interpretatif Weber tidak sepaham dengan pandangan aktor sosial menurut fenomenologis. Kalaupun sosiologi harus menerima tuntutan sang aktor sebagai data, sosiologi tidak diharuskan menerima kebenaran atas si pelaku. Kesulitan-kesulitan motivasi sang aktor bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, tingkah laku manusia sangat sukar dipahami. Kedua, tingkah laku manusia hanya dapat dipahami melalui manusia lain. Ketiga, manusia sebagai subjek atas ramalan ilmiah seringkali mempunyai kemampuan membalik ramalan-ramalan itu (Goode & Paul, 1962: 2).

Weber sebenarnya cukup hati-hati dalam memakai metode *verstehen*. Ia secara kasar membagi tipe interpretasi dalam tindakan sosial menjadi dua. Pertama, tipe tindakan yang paling rasional, berupa tindakan yang paling mudah dimengerti. Kedua, tipe tindakan yang kurang rasional, berupa tindakan yang sulit dimengerti.

Dengan demikian, sosiologi Weber telah menyajikan suatu program metodologis yang menggariskan patokan yang harus diambil untuk mengelakkan diri dari satu tafsiran si pelaku yang bersifat subjektif tentang hubungan-hubungan sosial ke suatu penjelasan yang berasal dari si pengamat. Kendatipun begitu, Weber sangat menyadari akan bahaya subjektivisme. Oleh karena itu, ia menyarankan agar sosiologi dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi titik temu antara yang 'unik' dengan yang berulang-ulang (*recurrent*), antara yang individu dengan yang umum. Sosiolog harus memahami arti yang dipesan oleh aktor

dan pemahaman yang dituangkan dalam konsep-konsep.

Pandangan-pandangan Weber yang rumit di atas sebenarnya dimulai dari interpretasi kenyataan sosial yang bersifat sederhana dan induktif. Bermula dari fakta sosiologis yang ditemukan di Jerman, bahwa sebagian besar dari "pimpinan perusahaan", "pemilik modal", dan personil teknis dan komersial di tingkat atas adalah orang-orang Protestan dan bukan orang-orang Katolik. Setelah ditelusuri, ternyata ada ajaran Calvinisme (sebuah sekte dari agama Protestanisme) tentang takdir dan nasib manusia di hari nanti. Dan ini, menurut Weber, merupakan kunci utama yang menentukan sikap hidup para penganutnya. Takdir telah ditentukan, keselamatan diberikan pada Tuhan kepada orang yang terpilih. Jadi manusia sesungguhnya dalam ketidakpastian yang abadi. Apakah ia merupakan orang yang terpilih atau tidak, tidak ada kepastian. Namun, merupakan kewajiban setiap orang untuk beranggapan bahwa dirinya adalah orang terpilih. Sebab, tiadanya kepercayaan berarti kurangnya rahmat. Untuk memupuk kepercayaan diri sendiri, maka manusia harus bekerja keras, karena bekerja keras merupakan satu-satunya hal yang dapat menghilangkan keraguan religius. Dalam kerangka pemikiran teologis seperti inilah 'semangat kapitalisme', yang bersandarkan kepada cita ketekunan, hemat, berperhitungan, rasional dan sanggup menahan diri, menemukan pasangannya (Abdullah, 1979: 8-9; Turner, 1984; Weber, 1979).

Dengan kata lain, dilema psikologis yang dihadapi orang-orang Calvinis adalah mereka menginginkan kepastian tentang keselamatan abadi saat berada dalam situasi mereka tidak punya kekuasaan untuk mengubah status keagamaannya maupun mengetahui takdirnya. Untuk keluar dari kemelut ketidakpastian ini, kaum Calvinis telah mengembangkan dua bimbingan kependetaam. Pertama, setiap penganut Calvinis yang takut kepada Tuhan secara religius wajib memiliki kepercayaan diri bahwa ia adalah manusia terpilih. Sebab keraguan adalah bujukan syaitan. Kedua, mengintenskan kegiatan duniawi untuk menghilangkan keragu-raguan dan membangkitkan kepercayaan diri. Bangunan posisi semacam ini yang kemudian hari, menurut perkiraan Weber, menjadi seperangkat motif-motif khusus yang secara konsepsi keagamaan telah mengilhami lembaga kapitalisme (Turner, 1984:76).

Dari metodologi yang digunakan Weber di atas sangatlah terlihat bahwa teori yang dihasilkan itu dibangun dari cara kerja yang induktif, berangkat dari pemahaman “makna” kepercayaan orang-orang Calvin yang subjektif dengan menggunakan metode *verstehen*.

Akhirnya secara ringkas dapat dikatakan bahwa paradigma epistemologi humanistik, memiliki ciri-ciri yang bertolak belakang dengan paradigma epistemologi positivistik, antara lain:

- Menolak paham “kesatuan ilmu” dan menganggap esensi ilmu sosial berbeda dengan ilmu alam. Oleh karenanya, metode ilmu fisika tidak dapat ditransfer dalam metode ilmu sosial.
- Akibat begitu menonjolnya fenomena tingkah laku manusia yang bersifat “unik”, maka metode *verstehen* merupakan kunci utama untuk memperoleh pengetahuan dalam ilmu sosial.
- Perilaku manusia pada dasarnya “tidak teratur” dan tidak berulang (*uniform*). Oleh karena itu, perilaku manusia tidak dapat diukur atau diramalkan dengan menggunakan mekanisme benda mati.
- Persoalan “makna” menjadi sentral pemahaman untuk mengerti gejala sosial (mengutamakan masalah yang bersifat implisit daripada yang eksplisit).
- Interpretasi atas perilaku manusia tidak bersifat kausal dan tidak dapat dijelaskan melalui hukum yang permanen atas generalisasi umum.
- Realitas sosial adalah sesuatu yang cair dan mudah berubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- Tindakan manusia yang menentukan struktur dan bukan sebaliknya struktur yang menentukan tindakan manusia.
- Struktur sosial sekedar merupakan konstruksi sosial dan dapat dinegoisasikan.
- Struktur sosial bersifat rentan, tidak permanen, dan artifisial. Jatuhnya rezim komunisme di Uni Soviet, misalnya, menunjukkan struktur bersifat tidak permanen (Turner, 1984).

Evaluasi terhadap Epistemologi Interpretatif

Seperti apa yang dilontarkan secara tajam oleh Popper atas “kegagalan” historisme, pada umumnya tradisi humanistik-interpretatif dianggap sangat subjektif serta tidak memiliki takaran ilmiah yang jelas. Dengan kata lain,

Popper menolak *verstehen* sebagai metode ilmiah, karena tidak menghasilkan hipotesis yang dapat diverifikasi. *Verstehen* dianggap hanya memiliki fungsi *heuristic*, padahal alam lingkungan dianggap sangat analog dengan pengalaman yang diperoleh dari perubahan lingkungan sosial dan sejarah.

Oleh karena itu, argumen keunikan (*uniqueness*), yakni bahwa sifat-sifat unik ilmu sosial dan kemanusiaan menuntut sebuah metode tersendiri, adalah tidak beralasan. Setiap objek studi mempunyai sifat keunikan atau *einmalig* ketika objek itu mempunyai sifat-sifat yang tidak terdapat pada objek lain (Vredenburg, 1985: 17). Bahkan, jika keunikan itu tidak bisa dikategorikan dan dibandingkan, keunikan itu bukanlah objek studi ilmiah. Cara kerja *verstehen* yang begitu subjektif, apabila hendak dimanfaatkan pada ilmu pengetahuan, memerlukan tindak lanjut untuk melihat apakah hipotesis-hipotesis yang diperoleh melalui *verstehen* juga berhasil tahan uji melalui pengendalian objektif secara empiris (Vredenburg, 1985: 60). Metode fisika telah banyak membuktikan keberhasilan dalam ilmu-ilmu sosial. Percobaan untuk menggunakan eksperimen ilmu fisika di dalam psikologi oleh generasi Wilhelm Wundt, misalnya, dianggap salah satu bukti pembaruan dalam ilmu tersebut (Popper, 1985: 1). Dalam arti ini, *verstehen* sebagai alat untuk memahamai sifat *einmalig* dari gejala sosial menjadi batal, karena hal itu dianggap salah jika dilihat dari segi metodologi. *Verstehen* tidak pernah bisa menggantikan pengujian hipotesis secara deduksi.

Sementara itu, kritik yang dilontarkan terhadap pemikiran Max Weber, umumnya karena pemikirannya dianggap mangabaikan beberapa hal. *Pertama*, faktor-faktor sosial dari luar sang sosiolog atau peneliti yang ikut menentukan pilihannya dan proses penelitian ilmiah tidak dipertimbangkan. *Kedua*, faktor-faktor dan proses sosial yang dari luar orang berpengaruh atas isi dan arah perilaku mereka terlihat diabaikan. Seperti apa yang dikatakan Alfred Schutz, selalu ada dilema dalam sosiologi Weber. Di satu saat, Weber mengambil posisi yang sama dengan si pelaku, di saat yang lain tak jarang tergelincir dalam posisi si pengamat. Demikian juga yang dikatakan Mills. Menurut Mills, perhatian Weber tentang motif-motif timbul dari niat untuk mengetahui bagaimana seorang pengamat mempertalikan motif-motifnya dan bagaimana pelaku-pelaku sosial

menafsirkan kegiatan-kegiatannya dan kegiatan orang lain (Turner, 1984: 23-24).

Schutz juga berpendapat sama. Dia menyatakan keprihatinannya atas kegagalan metodologi Weber, seperti *social meaning*, *action*, *social relationship*, yang masih membutuhkan dasar filosofis yang lebih kukuh. Kerancuan yang ditemukan Schutz terletak pada keburaman pemahaman dari sudut si pelaku atau dari sudut si pengamat. Schutz membedakan arti subjektif dan objektif. Arti objektif mengacu pada tanda-tanda, aksi-aksi yang mempunyai arti bagi umum, terlepas dari maksud dan kehendak si pengamat. Arti subjektif mengacu pada aksi dari orang lain dapat dipahami sepenuhnya jika menghadirkan secara langsung orang lain itu. Proporsi perbedaan Schutz inilah yang oleh Turner (1984) dianggap telah menyumbangkan konsep analisis tentang *social relationship* yang kurang diisi oleh Weber.

Dalam kesadaran kita, penerapan metode *verstehen* dalam penelitian ternyata banyak menemukan kesulitan teknis. Tidak jelasnya takaran-takaran ilmiah yang dapat diukur cenderung menjebak peran peneliti sebagai pengamat dan menjadikan peneliti memasukkan opini dalam menjangar realitas sosial, meskipun dalam antropologi sudah dipisahkan antara masalah emik dan masalah etik untuk tidak mencampuradukkan antara tafsir peneliti dan pendapat sang aktor atau antara pengamat dengan yang diamati.

Paradigma Teori Kritis

Ciri khas dari paradigma teori Kritis yang mengambil titik pangkal dari pemikiran Karl Marx adalah pemikiran filosofis disebutkan selalu berkaitan erat dengan kritik hubungan sosial yang nyata. Intinya bahwa para filsuf terdahulu hanya dianggap menafsirkan dunia dan kini sudah waktunya untuk mengubah dunia. Lebih lanjut pemikiran teori kritis merefleksikan masyarakat serta diri sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi (Magnis, 1990). Teori ini mulai berkembang tahun 1920-an dengan tokoh-tokoh yang terkenal, seperti George Luckas, Karl Korsh, Ernast Bloch, Antonio Gramscy, dan tentu saja kelompok Frankfurt, seperti Max Horkeimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcus, Eric Fromm, serta tokoh neo-Marxisme.

Menurut Ben Agger (2003) ada sejumlah ciri-ciri pokok dalam Teori Sosial

Kritis. *Pertama*, teori sosial kritis berlawanan dengan Positivisme. Teori ini beranggapan bahwa pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis "di luar sana". Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Teori ini juga berlawanan dengan Positivis yang mengatakan bahwa sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat. Sebaliknya, teori kritis percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historisitas (terus mengalami perubahan).

Kedua, teori Kritis membedakan masa lalu dan masa kini, yang secara umum ditandai oleh dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Masyarakat masa depan ini dapat diciptakan dengan aksi sosial dan politis yang dilakukan secara intensif. Peran teori sosial Kritis bersifat politis karena teori ini berpartisipasi dalam mendorong perubahan.

Ketiga, teori sosial Kritis berpandangan bahwa dominasi itu bersifat struktural. Kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, jender, dan ras. Teori sosial Kritis mengungkap struktur ini untuk membantu masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka alami.

Dalam level ini, teori sosial Kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, dilanggengkan oleh ideologi (Marx), reifikasi (Georg Lukacs), hegemoni (Gramsci), pemikiran satu dimensi (Macuse), dan metafisika keberadaan (Derrida). Kini kesadaran palsu dipelihara oleh ilmu sosial positivis seperti ekonomi dan sosiologi yang menggambarkan masyarakat sebagai entitas yang dikendalikan oleh hukum yang kaku. Akibatnya orang diajak berfikir bahwa satu-satunya perilaku yang beralasan berkaitan dengan penyelesaian pada pola-pola keajegan ini. Teori sosial kritis mematahkan kesadaran palsu dengan meyakini adanya kuasa manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif untuk mengubah masyarakat (Angger, 2003; Magnis, 1990).

Mengikuti pemikiran Marx, teori sosial Kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis. Meskipun struktur mengkondisikan pengalaman sehari-hari, pengetahuan tentang struktur dapat membantu masyarakat mengubah kondisisosialnya. Teori sosial kritis membangun jembatan dialektis ini dengan menolak determinisme ekonomi.

Kritik utama yang dilancarkan kepada epistemologi teori Kritis umumnya hampir mirip dengan paradigm Interpretatif. Hanya ada dua perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dua paradigma lainnya. Teori Kritis memiliki pandangan bahwa realitas sosial pada dasarnya merupakan hasil konstruksi kepentingan (ideologis) yang tidak pernah netral dan objektif. Realitas sosial pada dasarnya merupakan hasil konstruksi kepentingan yang rumit, atau menggunakan istilah Stuart Hall (1982), telah dikonstruksikan oleh berbagai kepentingan ideologis. Oleh karena itu, ilmuwan harus memihak dan tidak hanya menjadi penghuni menara gading. Bagi pengkritiknya, pandangan seperti ini bukan pandangan keilmuan tetapi ideologi. Jadi, sekali lagi, ada perbedaan mendasar dibandingkan dengan paradigma Positivistik dan Interpretatif, yang beranggapan ilmu itu netral dan tugas utama ilmuwan hanyalah memotret realitas secara objektif. Menurut teori Kritis, ilmuwan harus bisa mengubah realitas dengan cara yang partisipatoris dan emansipatoris (partisipasi yang membebaskan).

Pokok-pokok pemikiran teori Kritis inilah yang akhirnya mengilhami Kurt Lewin (1947), Corey (1953), Hopkins (1985), Hult & Lennung (1980), Carl Glickman (1992), Peter Park (1993), dan lainnya melahirkan apa yang sering disebut dengan *Action Research* atau yang lebih terkenal dengan *Participatory Action Research* (PAR). Poin pokok dari PAR adalah “*participatory dan emancipatory*”, yang kemudian dimodifikasi oleh CBR (*Community Base Research*).

Seperti dirumuskan Fals Borda (2001), “*Participatory Action Research has not been just a quest for knowledge. It is also transformation of individual attitudes and values, personality and culture, and altruistic process*”. *Participatory Action Research*, juga sering disebut PRA (*Participatory Rural Appraisal*) merupakan sebuah pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan **dari, dengan, dan oleh** masyarakat desa itu sendiri. *Participatory Action Research* dipandang mampu membawa tindakan dan refleksi, teori dan praktik, dengan cara terlibat dengan lainnya, dalam mengejar penyelesaian praktis terhadap berbagai isu penting yang menjadi perhatian masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan individu perorangan dan masyarakatnya (Bradbury & Reason, 2001: 2). Riset aksi

partisipatif tidak saja sekedar mencari pengetahuan. Riset tersebut juga merupakan proses transformasi sikap dan nilai individu, *personality*, dan budaya serta sifat altruistik.

Sebagai metode alternatif, PAR memiliki beberapa kelebihan. *Pertama*, berusaha menutupi kelemahan dengan merumuskan permasalahan atas dasar masalah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. *Kedua*, pendekatan dirancang berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan peneliti. *Ketiga*, hasil penelitian tidak hanya bermanfaat bagi si peneliti, tetapi juga masyarakat. Perubahan situasi, meningkatnya pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengubah serta kemampuan memecahkan masalah mereka atau mengubah situasi kehidupan mereka merupakan hasil yang diharapkan.

Prinsip-Prinsip PAR (*Participatory Action Research*)

- (1) PAR melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang tak berdaya--*involves a whole range of powerless groups of people* - kelompok masyarakat yang tereksplorasi, miskin, tertindas, dan kelompok marginal.
- (2) PAR melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dan aktif dalam keseluruhan proses riset.
- (3) Subjek penelitian berasal dari masyarakat itu sendiri dan penetapan masalah, analisis, dan penyelesaian masalahnya dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Tujuan akhirnya adalah transformasi radikal atas realitas sosial dan perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri. Penerima hasil riset adalah anggota masyarakat itu sendiri.
- (5) Proses riset partisipatif dapat menciptakan sebuah kesadaran masyarakat yang lebih besar terhadap sumber daya mereka sendiri dan memobilisasinya untuk mencapai pembangunan yang berdikari.
- (6) *Participatory Action Research* lebih merupakan metode atau riset ilmiah yang mampu menciptakan analisis autentik mengenai realitas sosial.
- (7) Peneliti ikut berpartisipasi dan belajar dalam proses penelitian, yaitu sebagai pengamat militan daripada sekedar sebagai pengamat yang terpisah (Hall & Kidd, 1978: 5)

Penutup

Setelah secara singkat disajikan pokok-pokok pikiran epistemologi Positivistik yang mendasari penelitian kuantitatif dan epistemologi Interpretatif yang mendasari penelitian kualitatif, serta epistemologi Kritis yang mendasari penelitian aksi, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan di sini.

Pertama, dalam kaitannya dengan epistemologi Positivistik, Interpretatif dan Kritis, meskipun berbeda tetapi ketiganya dapat saling mengisi. Ilmu-ilmu empiris analitis (Positivistik) mencegah kelompok pendekatan ilmu-ilmu hermeneutik (Interpretatif) dari subjektivisme yang ditandai oleh interpretasi yang semena-mena. Sebaliknya, pendekatan ilmu historis hermeneutik mencegah kelompok pendekatan empiris-analitis terjebak dalam determinisme yang membuta dan menyerdehanakan realitas sosial seperti benda alam. Sementara pendekatan epistemologi kritis lebih menagih ilmu sosial agar tidak hanya berfungsi memelihara *status-quo* tetapi juga sebagai instrumen pembebasan dan sekaligus menagih ilmuwan sosial bertanggungjawab terhadap objek yang diteliti.

Kedua, dari segi tugas keilmuan, karena ilmu pengetahuan sosial memiliki sifat menerangkan dan “memahami” (*verstehen*) yang merupakan dua belah mata uang yang sama, keduanya pada dasarnya bisa saling mengisi. Untuk menjelaskan realitas sosial membutuhkan pemahaman yang mendalam dan sekaligus verifikasi yang terukur. Demikian juga ramalan keilmuan tidak akan memberikan kontribusi yang berarti jika tidak didampingi imajinasi-refleksi. Sebaliknya imajinasi yang tajam saja tidak akan mencukupi, jika tidak dapat dibuktikan secara empiris. Demikian juga, tugas ilmu sosial bukan hanya mendiskripsikan, menjelaskan atau meramalkan jalannya realitas sosial. Tanpa ada kemampuan untuk mendalangi perubahan sosial, lembaga ilmu pengetahuan hanya akan menjadi menara gading.

Ketiga, dari segi tujuan, tugas utama penelitian kuantitatif adalah menjelaskan gejala sosial, menguji teori, membentuk fakta, dan menunjukkan hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, semakin luas lingkup variabel yang dijelaskan, semakin akurat pula penelitian yang dilakukan. Sementara tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami (*verstehen*) terhadap fenomena sosial, mencari konsep dengan *grounded*, dan melakukan kategorisasi sebagai

bahan untuk menemukan teori. Hal yang diutamakan dalam penelitian kualitatif bukan keluasan tetapi kedalaman. Sementara tujuan utama *Participatory Action Research* adalah melakukan perubahan sosial dengan prinsip *emancipatory* dan *participatory*, membebaskan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran kritis.

Keempat, dalam penelitian kuantitatif, proses yang digunakan bersifat deduksi, yaitu memverifikasi teori dengan mengembangkan hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, proses yang digunakan bersifat induksi sehingga tidak ada teori yang dibuktikan atau tidak menguji hipotesis. Sementara dalam PAR proses siklus yang menciptakan *link* antara teori dan praktik adalah transformasi sosial. Di sini tidak ada hipotesis kecuali yang dirumuskan masyarakat sendiri.

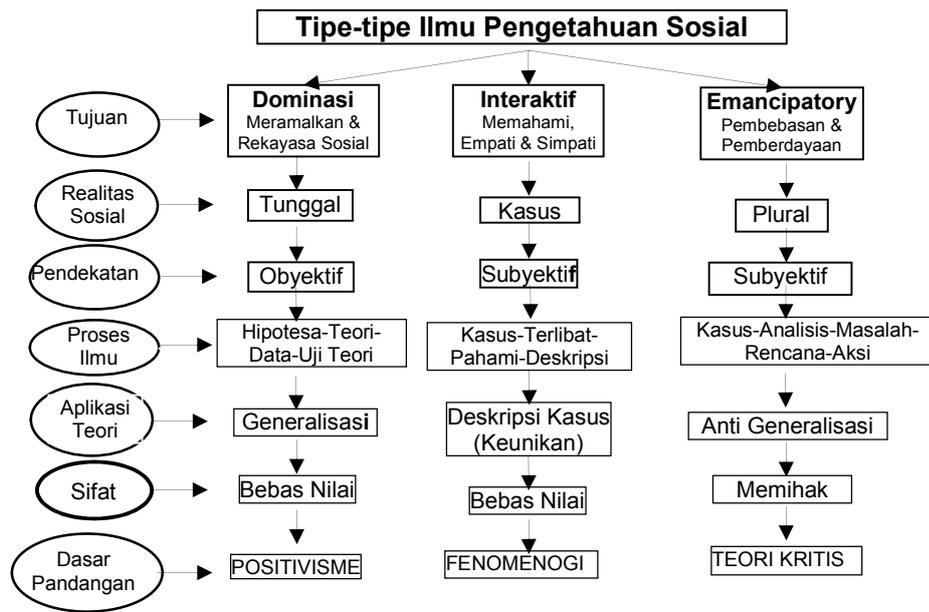
Kelima, dalam penelitian kuantitatif, teori diletakkan sebagai landasan uji hipotesis. Dalam survei ini ada prinsip keterwakilan (*representativeness*) atau probabilitas untuk generalisasi hasil temuan, sehingga masalah sampel sangat penting. Sementara fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif tidak ada prinsip keterwakilan atau probabilitas, sehingga masalah jumlah sampel tidak dipersoalkan. Sementara dalam penelitian aksi, fungsi teori hanya untuk mempermudah pemetaan masalah, bukan untuk menjelaskan (verifikasi) atau memahami (*verstehen*). Di sini tidak dikenal prinsip probabilitas dalam artian generalisasi, melainkan lebih mengutamakan pendalaman sebagai upaya memahami masyarakat.

Lampiran

Tabel 1. Skema Pembagian Metodologi Ilmu Sosial-Budaya

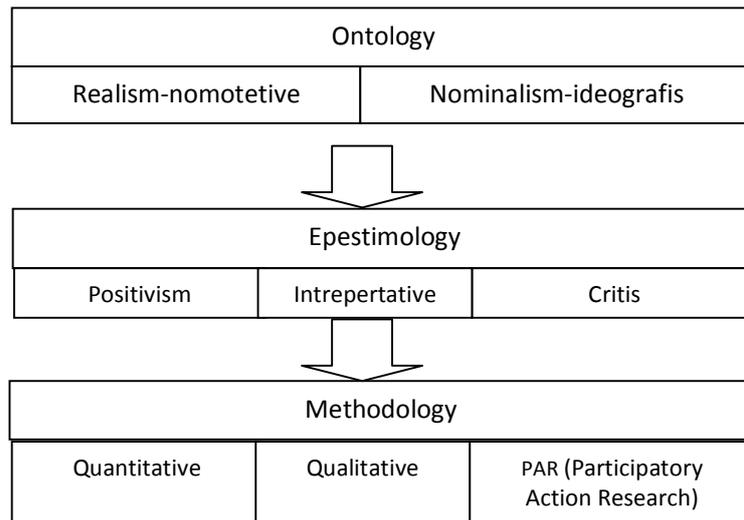
Positivis (Kuantitatif)	Interpretatif (Kualitatif)	Kritis (Aksi)
<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan ilmu pengetahuan untuk dominasi, meramalkan dan rekayasa sosial • Realitas sosial bersifat objektif • Ilmu pengetahuan bebas nilai • Realitas sosial tunggal • Tujuan utama penelitian adalah menjelaskan gejala sosial, menguji teori, membentuk fakta dan menunjukkan hubungan antarvariabel • Pendekatan objektif • Proses yang digunakan bersifat deduksi, yaitu memverifikasi teori dengan mengembangkan hipotesis • Dalam proses deduksi merupakan proses apriori tanpa empiri • Fungsi teori dalam penelitian survei ada prinsip keterwakilan (<i>representativeness</i>) atau probabilitas dalam generalisasi hasil temuan, karena itu sampel sangat penting • Dalam penelitian survei yang menjadi instrumen utama adalah kuesioner • Teknik/metode yang digunakan biasanya eksperimen, survei, wawancara berstruktur dan pengamatan berstruktur • Keberhasilan penelitian sangat ditentukan oleh instrumen (kuesioner) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan ilmu pengetahuan untuk interaksi, memahami dan empati • Realitas sosial bersifat subjektif • Ilmu pengetahuan bebas nilai • Realitas sosial sifatnya kasuistik • Tujuan utama penelitian adalah memahami (<i>verstehen</i>) terhadap fenomena sosial, mengembangkan konsep dengan <i>grounded</i> • Pendekatan subjektif • Proses yang digunakan bersifat induksi sehingga tidak ada teori yang dibuktikan atau tidak menguji hipotesis • Proses induksi merupakan hipotesis proses aposteriori dan empiri • Fungsi teori dalam penelitian kualitatif untuk memahami dan menafsirkan fenomena sosial • Dalam penelitian kualitatif tidak ada prinsip keterwakilan atau probabilitas, sehingga masalah jumlah sampel tidak dipersoalkan • Teknik/metode yang digunakan: pengamatan terlibat, wawancara tak berstruktur (terbuka dan mendalam), <i>life history</i>, dokumen dan sebagainya • Keberhasilan penelitian sangat tergantung pada peneliti sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan ilmu pengetahuan untuk emansipatory, membebaskan dan pemberdayaan • Realitas sosial subjektif • Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai • Realitas sosial bersifat plural • Tujuan utama penelitian membebaskan masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran kritis • Pendekatan subjektif • Proses siklus menciptakan <i>link</i> antara teori, praktik, dan transformasi sosial. Tidak ada hipotesis kecuali yang dirumuskan masyarakat sendiri • Proses diagnosis, rencana, aksi, evaluasi, dan refleksi yang dilakukan masyarakat • Fungsi teori hanya untuk mempermudah pemetaan masalah, bukan untuk menjelaskan (verifikasi) atau memahami (<i>verstehen</i>) • Tidak mengenal prinsip probabilitas dalam artian generalisasi, melainkan lebih mengutamakan pendalaman, sebagai upaya memahami masyarakat • Teknik/metode yang digunakan: pendampingan, partisipatif. Peneliti menjadi bagian masyarakat yang diteliti, terutama melalui FGD • Keberhasilan penelitian sangat tergantung pada masyarakat yang diteliti sendiri

Bagan 1. Trikotomi Paradigma Ilmu Pengetahuan Sosial

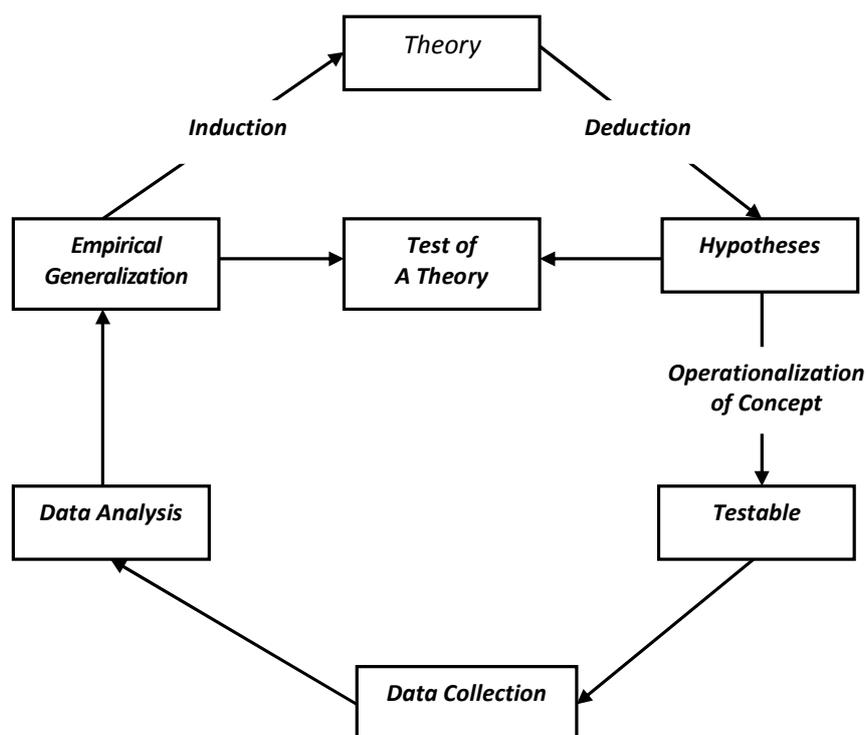


Habermas as quoted by Mahmudi, 1999

Bagan 2. Hierarki Paradigma Ilmu Pengetahuan



Bagan 3. Proses Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif



Source: The Cicle of Theory Construction and Testing (Wallace 1971)

Daftar Pustaka

- Adian, D.G. (2010). *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Agger, B. (2003). *Critical Social Theory*, terjemahan Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Abdullah, T. (1979). *Agama Etos Kerja dan Pengembangan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta.
- Akhyar, Y.L. (2011). *Teori Kritis dan Postmodernisme: Pengaruhnya pada Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial-Budaya Kontemporer*. Jakarta: FIB-UI.
- Blaikie, N. (2000). *Designing Social Reasearch*. First published by Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd.
- Borda, O.F. (2001). Participatory action research in social theory: Origins and challenges. in Peter Reason & Hillary Bradbury (Eds.). *Handbook of Action Research*
- Participative Inquiry & Practice*. London: Sage Publication Ltd.
- Denzin, N. & Lincons, Y.S. (Eds.). (1997). *Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications.
- Guba, E.G. (Ed.). (1990). *The Paradigm Dialog*. California: Sage Publications.
- Gustavsen, B. (2002). Theory and Practice: the Mediating Discourse. in Peter Reason & Hilary Bradbury (Eds), dalam *Handbook of Action Research Participative Inquiry & Practice*. London: Sage Publication Ltd.
- Goode, W. & Paul, K.H. (1962). *Methodes and Social Research*. New York, Toronto, London: Mc. Graw-Hill, Book Company, Inc.
- Habermas, J.(1990). *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*. Jakarta: LP3ES.
- _____, (1968). *Theory and Practice*, translated by John Viersel, Heimemaun, London.

- _____, 1972. *Knowledge and Human Interests*, Translated by Jeremy J. Shapiro, Boston: Beacon Press.
- Hall, S. (1982). The rediscovery of ideology: Return of the pressed in media studies. In Micheal Gurevitch and Janet Wollacott (Ed). *Mass Communication and Society*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Hardiman, F.B. (2003). *Kritik Ideologi Menyingkap Pengetahuan Bersama Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
- Johnson, P.D. (1981). *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*.
- Kleden, I. (1983). "Teori ilmu sosial sebagai variabel sosial: Suatu tinjauan filsafat sosial", *Prisma* Juni. Jakarta: LP3ES.
- Kuhn, T. (1970). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of Chicago Press.
- Laeyendecker, L. (1983). Orde, Verandering, Ongelijkheid Een Inleiding in de Geschiedenis Vande Sociologie, terjemahan Smekto, Tata Perubahan dan Ketimpangan, Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia.
- Magnis, F. von. (1990). *Ringkasan Sejarah Marxisme dan Komunisme*. Jakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Drijarkara.
- Martinjay. (2005). *Sejarah Mazhab Frankfrut: Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis*, terjemahan Nurhani. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- McCarthy, T. (2006). *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terjemahan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mills. C.W. (1959). *The Sociological Imaginations*: Harmond Worth: Middlesex.
- Peursen, van. CA. (1985). *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Reason, P. & Bradbury, H. (Eds.). *Handbook of Action Research Participative Inquiry & Practice*. London: Sage Publication Ltd.
- Ritzer, G. (1980). *Sociology: Multiple a Pardigm Sciences*, Revised edition, Allyn and Bacon, Boston.
- Ryan, A. (1985). *The Philosophy of Social Sciences*. London.
- Tashakkori, A. & Teddlie, C. (Eds.). (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavior Research*, California: SAGE Publication, Inc Teller Road.
- Turner, B. (1984). *Weber and Islam: Critical Study*, terjemahan G.A. Ticoalu, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Weber, Max, 1979,. Sekte-sekte Agama Protestan dan Semangat Kapitalsime dalam Taufik Abdullah (ed) Agama, Etos Kerja dan Perubahan Ekonomi, LP3ES, Jakarta.
- Wuisman, J.J.J. M. (1996). dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-ilmu sosial*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

